

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ismaya, S. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustofa dan Suratman. (2013). *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pamulardi, B. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saleh, K. W. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soerodjo, I. (2013). *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2009). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaenuddin, M. (2015). *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik: Kumpulan Essay, Kajian dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Kota Batam*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang *Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang*.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1983 tentang *Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang *Perencanaan Kehutanan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang *Perlindungan Hutan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang *Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang *Daerah Industri Pulau Batam*.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam*.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun*.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang *Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2010 tentang *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)*.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 tentang *perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ±124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ±86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ±1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar di Provinsi Kepulauan Riau*.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 867/Menhut-II/2014 tentang *Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau*.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 76/MenLHK-II/2015 tentang *Perubahan Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau*.

ARTIKEL

Tribun Batam, *Menteri Kehutanan Ganjal Lahan di Batam*. 23 Juli 2013.

Tribun Batam, *Menhut Asal-asalan Terbitkan SK*. 26 Juli 2013.

Tribun Batam, *Sani: SK Menhut Jangan Dijadikan Acuan*. 30 Agustus 2013.

Tribun Batam, *Bangunan di Kawasan Hutan di Batam Diputihkan, Investor pun Diuntungkan*. 13 Oktober 2014.

Tribun Batam, *Sektor Konstruksi di Batam Sempat Terpuruk Gara-Gara SK Menhut*. 14 Maret 2015.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung, diakses pada tanggal 29 Nopember 2015.

https://www.academia.edu/11566512/BAB_II_Status_dan_Pengaturan_Tanah_di_Batam_Berdasarkan_Politik_Hukum_Pertanahan, diakses pada tanggal 13 Desember 2015.

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2014/09/08/pensertipikatan-hak-atas-tanah-hak-guna-bangunan-di-atas-hak-pengelolaan-di-kota-batam/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelitian, diakses pada tanggal 20 Desember 2015.

<http://sudidirman.blogspot.co.id/2014/11/tinjauan-pengelolaan-hutan-lindung.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2015.

<https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2015.

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

Surya. 07 Maret 2015. *SK Perubahan Kawasan Hutan di Kepri Dibahas secara Transparan dan Partisipatif*. <http://batamtoday.com/berita54607-SK-Perubahan-Kawasan-Hutan-di-Kepri-Dibahas-secara-Transparan-dan-Partisipatif.html>, diakses pada tanggal 24 Januari 2016.

<http://industri.bisnis.com/read/20150308/99/409548/ombudsman-apresiasi-sk-baru-menteri-lhk-soal-kawasan-hutan-kepri>, diakses pada tanggal 24 Januari 2016.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodologi.pdf>, diakses pada tanggal 21 Februari 2016.

<https://jurnalbumi.com/hutan-lindung/#return-note-68-1>, diakses pada tanggal 06 Maret 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1a24ebf2c43/perbedaan-antara-peraturan-menteri-dengan-keputusan-menteri>, diakses pada tanggal 06 Maret 2016.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-mochaditia-29192-9-unikom_m-i.pdf, diakses pada tanggal 09 Maret 2016.

Anggraeny, I. *Akibat Hukum Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan di Kota Batam (Studi Kasus Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 463/Menhut-II/2013 di Kota Batam)*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/689/676>, diakses pada tanggal 09 Maret 2016.

Aini, L. N. Desember 2014. *Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Warga Masyarakat Di Atas Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 463/Menhut-II/2013 di Kota Batam, Volume 2, Nomor 3*. <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/9089/3866>, diakses pada tanggal 11 Maret 2016.

<http://equityjusticia.blogspot.co.id/2014/07/perbedaan-antara-peraturan-dan-keputusan.html>, diakses pada tanggal 02 April 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_\(statistika\)#Pengambilan_menurut_tujuan_28Purposive_sampling.29](https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_(statistika)#Pengambilan_menurut_tujuan_28Purposive_sampling.29), diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

<http://gerrytri.blogspot.co.id/2013/06/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

<http://batams.com/dir/business/notaries/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

<http://www.batams.com/dir/realestate/realestatedevelopers/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

<http://www.batams.com/dir/moneyfinance/banks/Page-6.php>, diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Anly Cenggana, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Batam, pada tanggal 27 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan Marzon, Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional Batam, pada tanggal 06 April 2016.

Hasil wawancara dengan Haji Bambang Supriyadi, S.E., M.H., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Batam, pada tanggal 06 April 2016.

Hasil wawancara dengan Raja Mustakim, pengusaha *developer* PT. Buana Cipta Propertindo di Kota Batam, pada tanggal 06 April 2016.

Hasil wawancara dengan Mujiono Suprpto dan Tio, Departemen Legal di PT. Bangun Arsikon Batindo, *developer* di Kota Batam, pada tanggal 22 April 2016.

Hasil wawancara dengan Agustianto, S.H., M.Kn., Manajer Hukum di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara, Kota Batam, pada tanggal 25 April 2016.

Hasil wawancara dengan Dila, Departemen Legal di PT. Glory Point, *developer* di Kota Batam, pada tanggal 05 Mei 2016.

Hasil wawancara dengan Febtriana, Staf Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anly Cenggana, S.H. di Kota Batam, pada tanggal 10 Mei 2016.

Hasil wawancara dengan Yohana, pada tanggal 15 Mei 2016.

Hasil wawancara dengan Harvi, *Relationship Manager* di Bank Tabungan Negara Cabang Batam Centre, Kota Batam, pada tanggal 17 Mei 2016.